**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Gambaran Umum**

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan

Dasar hukum akuntansi berbasis akrual adalah UU nomor 17 tahun 2003 dan sesuai amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada [Pemerintah Daerah](http://www.bppk.kemenkeu.go.id), pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2017.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
	1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan laporan keuangan OPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimugkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sedangkan manfaat penerapan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
	1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Temanggung nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Temanggung nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
	1. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Indikator Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD |
| BAB III | : | Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinpermades |
| BAB IV | : | Kebijakan Akuntansi  |
| BAB V | : | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| BAB VI | : | Penjelasan Informasi Non Keuangan |
| BAB VII | : | Penutup |

**BAB II**

**INDIKATOR EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD**

* 1. **Indikator Ekonomi Makro**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat, yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah PDRB, struktur PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, nilai investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan dengan pembenahan pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasidan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan menempatkan prioritas pengembangan pada :

1. Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
	1. **Kebijakan Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, termasuk di dalamnya APBD Perubahan diarahkan pada kebijakan-kebijakan manajemen keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

* 1. **Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD**

Indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan jembatan antara Perencanaan Strategis (PK) dan akuntabilitas.

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2018 melalui APBD Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 5.179.249.351,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.642.723.351,00 dan belanja langsung kegiatan sebesar Rp 2.536.526.000,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.034.381.982,00 atau sebesar 97,2 %, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

| **No** | **Jenis Belanja**  | **Anggaran** | **Realisasi** | **Sisa Anggaran** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| I | Belanja Tidak Langsung | 2.642.723.351 | 2.604.194.192 | 38.529.159 | 98,54 |
| II | Belanja Langsung: | 2.536.526.000  | 2.430.187.790 | 106.338.210 | 95,81 |

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2018 total anggaran adalah Rp 5.179.249.351,00 terbagi menjadi 48 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 5.034.381.982,00 atau 97,20% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | REALISASI | % |
| (Rp) |
| Gaji dan Tunjangan | 1.917.518.551 | 1.887.140.192 | 98,42 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 725.204.800 | 717.054.000 | 98,88 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 15.000.000 | 13.846.165 | 92,31 |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 5.000.000 | 4.146.000 | 82,92 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 50.000.000 | 48.743.375 | 97,49 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 21.000.000 | 19.824.237 | 94,40 |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 5.000.000 | 1.643.000 | 32,86 |
| Penyediaan alat tulis kantor | 16.000.000 | 15.997.500 | 99,98 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.500.000 | 7.486.800 | 99,82 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.700.000 | 2.200.000 | 81,48 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 16.000.000 | 14.729.400 | 92,06 |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 110.000.000 | 109.844.700 | 99,86 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 7.000.000 | 5.569.850 | 79,57 |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 50.000.000 | 49.840.000 | 99,68 |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | 25.000.000 | 24.971.700 | 99,89 |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 8.250.000 | 7.750.000 | 93,94 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP SPAMS | 23.830.000 | 23.800.000 | 99,87 |
| Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa | 89.320.000 | 86.045.000 | 96,33 |
| Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 | 45.000.000 | 43.785.000 | 97,30 |
| Fasilitasi Pendamping Desa | 46.700.000 | 46.700.000 | 100,00 |
| Fasilitasi Kelembagaan BKAD | 47.800.000 | 47.673.400 | 99,74 |
| Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa | 50.260.000 | 49.269.000 | 98,03 |
| Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | 398.500.000 | 395.606.000 | 99,27 |
| Penyusunan dan Sosialisasi Perbub Tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelur | 23.065.000 | 22.344.000 | 96,87 |
| Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa | 262.567.000 | 247.626.123 | 94,31 |
| Pembinaan Adat Istiadat | 19.430.000 | 16.378.500 | 84,29 |
| Monitoring dan Evaluasi TTG dan Kegiatan Krenova | 75.000.000 | 70.917.000 | 94,56 |
| Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD | 20.000.000 | 17.750.000 | 88,75 |
| Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam Rangka Ketahanan Pangan | 14.400.000 | 13.399.000 | 93,05 |
| Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES | 56.405.000 | 50.079.000 | 88,78 |
| Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | 73.530.000 | 70.308.000 | 95,62 |
| Bulan Bhakti Gotong Royong | 38.635.000 | 36.850.000 | 95,38 |
| Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa | 15.000.000 | 13.184.000 | 87,89 |
| Fasilitasi Dana Transfer ke Desa | 160.500.000 | 154.166.040 | 96,05 |
| Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa | 22.344.000 | 18.871.000 | 84,46 |
| Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan | 58.110.000 | 56.358.000 | 96,99 |
| Fasilitasi Implementasi UU Desa | 60.000.000 | 58.620.000 | 97,70 |
| Penyelanggaraan Lomba Desa/Kelurahan | 150.000.000 | 149.872.000 | 99,91 |
| Pendataan Awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan | 49.550.000 | 46.031.000 | 92,90 |
| Penguatan keuangan desa | 23.475.000 | 18.662.000 | 79,50 |
| Sistem Informasi Desa (SID) (Ban-Keu) | 62.790.000 | 60.420.000 | 96,23 |
| Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan | 49.018.000 | 47.508.000 | 96,92 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 |
| Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengadaa | 20.000.000 | 12.844.000 | 64,22 |
| Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa | 52.752.000 | 46.490.000 | 88,13 |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan SisKeuDes | 139.595.000 | 131.539.000 | 94,23 |
|  JUMLAH | 5.179.249.351 | 5.034.381.982 | 97,20 |

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

* 1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah OPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

* 1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
	2. Entitas akuntansi adalah Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannyadan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
	3. **Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan OPD adalah Basis Akrual. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakuiuntuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual(accrual basis of accounting.

Dalam Basis Akrual pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

* 1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
	2. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
	3. **Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode..

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2018 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan Keuangan atas pelaksanaan Kegiatan di Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 dan PP PP No. 71 Tahun 2010, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PP 71 tahun 2010 Pokok dari Laporan Keuangan terdiri dari:

* + 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

(b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

(d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

(a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dariRekening Kas Daerah.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai denganklasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

(f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Transfer

* Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Surplus/defisit-LRA;

* Merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
	+ 1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

* + 1. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Laporan Operasional (LO) yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

* + 1. Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

1. Beban

Beban diakui pada saat:

(a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadinya konsumsi aset;

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

1. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

1. Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

1. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit darikegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

1. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

1. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dankejadian luar biasa.

* + 1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, danNeraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir ,Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

(b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

* 1. **Kebijakan Akuntansi Akrual**

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnyamenjadi pendapatan dan beban Pemerintah Daerah pada suatu periode. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

1. **Pendapatan**

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting.

Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

1. **Belanja**

Perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual adalah berubahnya Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban.

1. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4. Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.
5. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

1. Pengakuan Persediaan

Pengakuan ‘Persediaan’ dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

1. Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

1. **Beban persediaan**

 Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cra saldo awal persediaan ditambah pembelian atau dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

1. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Klasifikasi Aset Tetap

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin;
3. Bangunan dan Gedung;
4. Jalan, Jaringan, Instalasi;
5. Aset Tetap Lainnya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Aset Tetap

 Aset Tetap dapat diakui apabila :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun denan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasikan).Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset donasi

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

1. Pengakuan Aset dari Belanja Modal

Jika aset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai aset.

1. Penghapusan Aset Tetap tetap dilakukan jika Aset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.
2. **Kewajiban**

Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Definisi Kewajiban.

1. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Fihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntasi.

1. **Ekuitas Dana**

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansiekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Dalam Basis Akrual istilah Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus,digantikan dengan Ekuitas.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

* 1. **Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan**
		1. **Penjelasan Laporan Neraca**
1. **ASET**

**ASET LANCAR**

1. Kas dan Setara Kas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kas dan Setara Kas : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| - | Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.593.628 | 68.722.120 |
| Jumlah Kas dan Setara Kas | 5.593.628 | 68.722.120 |

Kas dan setara kas tersebut di atas adalah sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

* Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinpermades per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.024.030,00 dan pajak yang belum disetor sebesar Rp3.569.598,00 dan saldo tahun 2018 sebesar Rp68.722.120,00.

Pajak tahun 2018 yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.569.598,00 terdiri dari :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | PPh 21 | Rp | 3.297.780,00 |  |
| b. | PPh 22 | Rp. | 62.727,00 |  |
| c. | PPN | Rp. | 209.091,00 | + |
|  |  | Rp. | 3.569.598,00 |  |
|  |  |  |  |  |

1. Beban dibayar dimuka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beban dibayar dimuka : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| - | Beban Pegawai dibayar dimuka | 0 | 0 |
| Jumlah Beban dibayar dimuka | 0 | 0 |

Tidak ada beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2018

1. Persediaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persediaan : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| - | Persediaan Bahan Pakai Habis | 554.000 | 1.719.000 |
| - | Persediaan Bahan/Material | 0 | 0 |
| - | Persediaan Barang Lainnya | 0 | 0 |
| Jumlah Persediaan | 554.000 | 1.719.000 |

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persediaan : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Persediaan Bahan Pakai Habis | 554.000 | 1.719.000 |
|  | * + Persediaan Alat Tulis Kantor
 | 148.500 | 1.029.000 |
|  | * Persediaan alat listrik dan elektronik
 | 0 | 690.000 |
|  | * + Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
 | 0 | 0 |
|  | * + Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 | 305.500 | 0 |
|  | * + Persediaan Barang Cetakan
 | 100.000 | 0 |
|  | * + Perabot Dapur
 |  |  |
|  | * + Kelengkapan komputer
 | 0 |  |
| b. | Persediaan Bahan/Material | 0 | 0 |
|  | * + Persediaan Bahan baku bangunan
 | 0 | 0 |
|  | * + Persediaan Bahan Lainnya
 | 0 | 0 |
| c. | Persediaan Barang Lainnya | 0 | 0 |
|  | * + Persediaan Barang Yang Akan diberikan/dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 | 0 | 0 |
|  | * + Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
 | 0 | 0 |
| Jumlah Persediaan | 554.000 | 1.719.000 |

.

 **ASET TETAP**

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2018 dan 2017 tersaji sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aset Tetap : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Peralatan dan Mesin | 1.482.125.650 | 1.419.698.750 |
| b. | Gedung dan Bangunan | 616.275.000 | 616.275.000 |
| c. | Jaringan listrik | 1.284.800 | 1.284.800 |
| d. | Jaringan telepon | 14.240.000 | 10.775.000 |
| e. | Akumulasi Penyusutan | ( 1.614.638.151,20) | (1.519.830.651,10) |
| Jumlah Aset Tetap | 499.287.298,80 | 528.202.898,90 |

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam TA 2018 sebesar Rp73.959.800,00 Nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiva Tetap | Saldo 2017 | Tambah | Kurang | Saldo Akhir |
| Tanah |  |  |  |  |
| Peralatan & Mesin | 1.419.698.750 | 74.811.700 | 12.384.800 | 1.482.125.650 |
| Gedung & Bangunan | 616.275.000 | 0 | 0 | 616.275.000 |
| Jaringan Listrik | 1.284.800 | 0 | 0 | 1.284.800 |
| Jaringan Telepon | 10.775.000 | 3.465.000 | 0 | 14.240.000 |
| Akumulasi Penyusutan | (1.519.830.651,10) | 0 | 0 | (1.614.638.151,20) |
| **JUMLAH** | 528.202.898,90 | 78.276.700 | 12.384.800 | 499.287.298,80 |

Saldo akhir Aset Tetap TA 2018 sebesar Rp499.287.298,80 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan dari belanja modal tahun 2018.

Total kenaikan nilai aset tahun 2018 adalah sebesar Rp65.891.900,00 Nilai tersebut didapatkan dari total tambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp62.426.900,00 dan belanja jaringan internet sebesar Rp3.465.000,00.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah

OPD tidak mempunyai aset berupa tanah alias Nihil.

1. Peralatan dan Mesin

Penilaian atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal didasarkan pada Nilai Perolehan/Pembelian. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp1.482.125.650,00 dan Rp1.419.698.75,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.482.125.650,00 karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Klasifikasi Aset | Saldo Awal/2017 | Tambah | Kurang | Saldo 31 Des 2018 |
| 1 | Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor | 809.287.000 | 0 | 0 | 809.287.000 |
| 2 | Alat Kantor | 36.330.000 | 16.150.000 |   500.000 | 51.980.000 |
| 3 | Alat Rumah Tangga | 183.832.250 | 27.926.900 | 9.000.000 | 202.759.150 |
| 4 | Komputer | 278.210.000 | 21.415.000 | 4.065.000 | 295.560.000 |
| 5 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 70.639.500 | 0 | 0 | 70.639.500 |
| 6 | Alat Studio | 18.450.000 | 11.000.000 | 500.000 | 28.950.000 |
| 7 | Alat Komunikasi | 2.1450.000 | 0 | 0 | 21.450.000 |
| 8 | Peralatan Pemancar | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| **JUMLAH** | 1.419.698.750 | 76.559.400 | 14.065.000 | 1.482.125.650 |

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 berasal dari belanja modal tahun anggaran 2018 sebesar Rp76.559.400,00 dan mutasi sebesar Rp14.065.000,00 dikarenakan reklas aset dan perubahan status barang menjadi barang ekstrakomptabel.

1. Gedung dan Bangunan

Penilaian atas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dalam rangka penyusunan neraca awal didasarkan padai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama Rp616.275.000,00.

1. Jaringan listrik

Saldo jaringan listrik per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.284.800,00.

1. Jaringan telepon

Saldo jaringan telepon per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp14.240.000,00 dan Rp10.775.000,00. Penambahan aset adalah sebesar Rp3.465.000,00 merupakan belanja modal internet.

1. Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0

**ASET LAINNYA**

 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama Rp2.156.100,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud dan aset rusak, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aset Lainnya : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
|  | Aset Tidat Berwujud Lainnya | 253.200.000 | 253.200.000 |
|  | Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya | 253.200.000 | 253.200.000 |
| b. | Aset Rusak | 2.156.500 | 2.156.500 |
|  | Aset Rusak | 113.449.500 | 113.449.500 |
|  | Akumulasi penyusutan aset rusak | 111.293.000 | 111.293.000 |
| Jumlah Aset Lainnya | 2.156.500 | 2.156.500 |

1. **KEWAJIBAN**
2. Kewajiban Jangka Pendek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kewajiban Jangka Pendek : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 3.569.598 | 43.235.150 |
| b. | Utang Bunga | 0 | 0 |
| c. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0 | 0 |
| d. | Pendapatan Diterima Dimuka | 0 | 0 |
| e. | Utang Belanja | 55.922.746 | 60.075.650 |
| f. | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0 | 0 |
| Jumlah kewajiban jangka pendek | 59.489.818 | 103.310.800 |

Hutang PFK (Hutang Pada Fihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.569.598,00 yaitu hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluran OPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun 2018 dengan rincian :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | PPh 21 | Rp. | 3.297.780,00 |  |
| b. | PPh 22 | Rp. | 62.727,00 |  |
| d. | PPN | Rp. | 209.091,00 | + |
|  | Jumlah | Rp | 3.569.598,00 |  |

1. Kewajiban Jangka Panjang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kewajiban Jangka Panjang : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Utang Dalam Negeri |  |  |
| b. | Utang Jangka Panjang Lainnya |  |  |
| Jumlah kewajiban jangka pendek |  |  |

Tidak ada kewajiban jangka panjang

1. **EKUITAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekuitas : | 2018 | 2017 |
| Rp | Rp |
| a. | Ekuitas | -4.562.817.433,2 | 497.489.718,90 |
| b. | Ekuitas SAL | 0 | 0 |
| c. | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 5.010.919.042,00 | 0 |
| Jumlah Ekuitas | 448.101.608,8 | 497.489.718,90 |

Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp448.101.608,8 dan Rp497.489.718,90.

* + 1. **Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran**
1. PENDAPATAN

Tidak ada pendapatan

1. BELANJA

Belanja meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belanja Daerah : | 2018 | 2017 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a. | Belanja Operasi | 5.100.784.351 | 4.956.105.282 | 6.527.151.456 |
| b. | Belanja Modal | 78.465.000 | 78.276.700 | 56.557.250 |
| Jumlah | 5.179.249.351 | 5.034.381.982 | 6.583.708.706 |

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2018 sebesar Rp5.034.381.982,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp5.179.249.351,00.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2018 dan 2017 sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belanja Pegawai : | 2018 | 2017 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| - | Belanja Pegawai | 3.156.263.351 | 3.112.671.192 | 3.294.836.071 |
| - | Belanja Barang/Jasa | 1.944.521.000 | 1.843.434.090 | 3.232.315.385 |
| Jumlah Belanja Operasi | 5.100.784.351 | 4.956.105.282 | 6.527.151.456 |

1. Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp3.112.671.192,00 atau 98,62 % dari anggaran sebesar Rp3.156.263.351,00

1. Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2018 sebesar Rp1.843.434.090,00 atau 94,80 % dari anggaran sebesar Rp1.944.521.000,00

1. Belanja Modal

Belanja Modal Dinpermades pada tahun 2018 meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dan belanja modal yang masuk barang ekstrakomptabel, dengan realisasi TA 2018 dan 2017 sebagai berkut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belanja Modal : | 2018 | 2017 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| - | Peralatan dan Mesin | 78.465.000 | 78.276.700 | 56.557.250 |
| Jumlah Belanja Modal | 78.465.000 | 78.276.700 | 56.557.250 |

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp78.276.700,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp78.465.000,00 dan dari nilai realisasi tersebut yang menambah nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp62.426.900,00 dan berpindah menjadi aset jaringan sebesar Rp3.465.000,00 serta berubah menjadi barang ekstrakomptabel dan barang persediaan sebesar Rp12.384.800,00.

Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| 1 | Handycam Sony | 1 | 13.850.000 | 13.850.000 |
| 2 | Micro SD Sandisk | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | Tripod somita | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 4 | Dry cabinet | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 5 | Red head lamp | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 6 | Light stand | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Kabel video | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | Brica Invra Alpha Drone | 1 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 9 | Piring Daun | 3 | 24.000 | 72.000 |
| 10 | Rak | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 11 | Batu Pack | 2 | 3.000 | 6.000 |
| 12 | Sendok Makan | 3 | 25.000 | 75.000 |
| 13 | Ceplok Polos | 1 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | Piring Kue | 12 | 10.000 | 120.000 |
| 15 | Dinner Plate | 6 | 28.500 | 171.000 |
| 16 | Vacuum Cleaner | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 17 | Karpet | 32 | 93.750 | 3.000.000 |
| 18 | W/I C/S Tea Set+Rak | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 19 | Piring Kue Segi 5 | 14 | 10.000 | 140.000 |
| 20 | Toples Indiana | 3 | 128.500 | 385.500 |
| 21 | Onyx Tutup | 12 | 7.300 | 87.600 |
| 22 | Nampan | 1 | 27.600 | 27.600 |
| 23 | Gelas Umbra Polos | 24 | 1.350 | 32.400 |
| 24 | Gelas Umbra Bbc | 12 | 2.150 | 25.800 |
| 25 | Gelas Kaki | 12 | 4.850 | 58.200 |
| 26 | Sebet Panda Kotak | 4 | 12.900 | 51.600 |
| 27 | Tempat Tisu Persegi | 1 | 26.900 | 26.900 |
| 28 | Nampan | 2 | 17.600 | 35.200 |
| 29 | Dispenser |  | 894.000 | 894.000 |
| 30 | Flashdisk | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 31 | Hardisk Eksternal | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 32 | Rak Arsip 120x30x240 | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 33 | Rak Arsip 120x30x200 | 4 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| 34 | Rak Arsip 120x30x150 | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 35 | Hardisk Ekternal | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 36 | Korden | 60 | 100.000 | 6.000.000 |
| 37 | Filling Cabinet Brother B.104 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 38 | Printer Epson L3110 | 3 | 2.500.000 | 7.500.000 |
| 39 | Laptop | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 40 | Dispenser Miyako Wdp-100h | 1 | 677.900 | 677.900 |
| 41 | Dispenser Miyako Wdp-300h | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 42 | Djar Roma 12 L | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 43 | Mangkok | 3 | 22.500 | 67.500 |
| 44 | Vacuum Cleaner 1L-130S IDEALIFE | 1 | 375.000 | 375.000 |
| 45 | Vacuum Cleaner 1L-130 IDEALIFE | 1 | 315.000 | 315.000 |
| 46 | Scanner Cannon Lide 120 | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 47 | Bendera Kipas | 10 | 30.000 | 300.000 |
| 48 | Bendera Umbul Umbul | 5 | 40.000 | 200.000 |
| 49 | Microtic | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 50 | Flashdisk | 4 | 85.000 | 340.000 |
| 51 | Mouse | 3 | 60.000 | 180.000 |
| 52 | Kabel Utp | 100 | 9.000 | 900.000 |
| 53 | TP Link Switch | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 54 | Amp Rj45 | 1 | 175.000 | 175.000 |
| **JUMLAH** | 78.276.700 |

* + 1. **Penjelasan Laporan Operasional**

 **LAPORAN OPERASIONAL**

 **Beban**

 **Beban Operasi**

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp4.953.117.378,00 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa.

1. Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2018 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2018 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2018 dikurangi utang belanja 2017 dikurang beban dibayar dimuka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja pegawai | = | Rp | 3.112.671.192 |  |
| Utang belanja pegawai 31 Des 2018 | = | Rp | 53.571.200 | + |
|  |  | Rp | 3.166.242.392 |  |
| Utang belanja pegawai 2017 | = | Rp | 58.792.800 |  |
| Beban dibayar dimuka 31 Des 2018 | = | Rp | 0 | - |
|  |  | Rp | 3.107.449.592 |  |

Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.107.449.592,00

1. Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2018 ditamah persediaan awal 2018 dikurangi persediaan per 31 Desember 2018 dan utang barang/jasa awal 2018

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.845.667.786,g,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja barang/jasa | = | Rp | 1.843.434.090 |  |
| Utang belanja barang/jasa | = | Rp | 2.351.546 |  |
| Persediaan awal | = | Rp | 1.282.850 | + |
|  |  | Rp | 1.847.068.486 |  |
| Persediaan per 31 Des 2018 | = | Rp | 2.518.800 |  |
| Utang barang/jasa 2017 | = | Rp | 1.282.850 | - |
|  |  | Rp | 1.843.266.836 |  |

**Surplus/Defisit dari operasi**

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar -Rp4.953.117.378,00

* + 1. **Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas merupakan penjumlahan dari Ekuitas tahun 2017 ditambah defisit LO dikurangi Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan yang berupa mutasi aset, perubahan aset menjadi barang ekstrakomptabel.

|  |
| --- |
| **Laporan Perubahan Ekuitas** |
| SKPD  | : 102070100-DINPERMADES |
| Periode  | : 31-12-2018 |  |
|  |  |  |
| **Keterangan** | **Jumlah** |
| Ekuitas Awal |   | 497.489.718,90 |
| Surplus Defisit LO | -5.068.056.926,57 |   |
| Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan | 7.749.774,47 |   |
| Ekuitas untuk dikonsolidasikan | 5.010.919.042,00 |   |
| Ekuitas Akhir |   | 448.101.608,80 |

1. Ekuitas awal sebesar Rp 487.445.245,00, sedangkan defisit-LO atau realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp5.068.056.926,57
2. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp7.749.774,47 merupakan jumlah belanja modal yang tidak dicatat sebagai aset tetap, tetapi menjadi barang ekstrakomptabel dikarenakan kebijakan akuntasi belanja modal yang bernilai di bawah Rp 200.000,00 dimasukkan kelompok barang ekstrakomptabel sejumlah Rp9.920.000,00 dan mutasi asset burupa barang modal yang menjadi barang pakai habis sejumlah Rp2.464.800,00
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2018 sebesar Rp5.010.919.042,00
4. Ekuitas akhir pada tahun 2018 adalah Rp448.101.608,80

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

* 1. **Data Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

 Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum keberdaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Dan Desa Yang Maju Dan Mandiri” dan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber  daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna;
2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan  kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur;
4. Mendorong  Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
5. Mendorong, pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju dan kemandirian desa;
	1. **Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris, terdiri dari :
3. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa
7. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM
8. Seksi Perkembangan Desa
9. Bidang Pembangunan Desa
10. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong
11. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat
12. Seksi Keuangan Desa
13. Bidang Pengembangan Masyarakat
14. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

 Guna

* 1. **Setor Kas Daerah**

Sisa UYHD disetor ke kas daerah melebihi tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.024.030,00 pada tanggal 16 Januari 2018 berupa saldo GU sebesar Rp186.480,00 dan saldo TU sebesar Rp1.837.550,00 dikarekanakan ada koreksi SPJ.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

. Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2018. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2019

Kepala Dinpermades

Kabupaten Temanggung

AGUS SARWONO,S.Sos,MM

NIP.19660411 198607 1 001